

***Collaborative Governance* Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bligo Sebagai Strategi Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19**

Sujatmiko¹⁾, Eny Boedi Orbawati²⁾, Fadlurrahman³⁾, Ari Mukti⁴⁾

1), 2), 3), 4) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tidar
Email : *sujatmikoko@untidar.ac.id¹⁾, enyorbawati@yahoo.co.id²⁾, fadlurrahman@untidar.ac.id³⁾
arimukti@untidar.ac.id³⁾*

ABSTRACT

This study aims to explore the success of community empowerment by analyzing collaborative governance in the empowered village program in Bligo Village, Ngluwar District, Magelang Regency, Central Java. Bligo Village is one of the prototype villages for the implementation of the empowered village program with several activities in the form of schools for productive mothers, waste banks, nutrition gardens, and the development of water tourism which continues to this day. The success of Bligo Village in implementing empowerment cannot be separated from the support of various actors including the village government, zakat house NGOs, community groups, and various private parties who participated in the success of the empowered village program. This research method is qualitative with a case study approach. Informants were selected purposively by involving various stakeholders who understand the problems studied. Data collection was done through FGD, in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out interactively, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions using 10 dimensions of collaborative governance. The results of the study indicate that the implementation of the empowered village program is through various discussions with various parties who trust each other. The trust between the parties is poured into a commitment in the form of a cooperation contract and a letter of recommendation that is mutually agreed upon. The network structure in Bligo Village is categorized as self-governance, where each party participates in carrying out their respective duties and responsibilities. Each party has their own authority to carry out their duties and access (rights) various needs in order to make the empowered village program a success.

Keywords : *Collaborative governance; Bligo Village; Powerful Village.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keberhasilan pemberdayaan masyarakat dengan menganalisis collaborative governance dalam program desa berdaya di Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Desa Bligo menjadi salah satu desa protipe pelaksanaan program desa berdaya dengan beberapa aktifitas berupa sekolah ibu-ibu produktif, bank sampah, kebun gizi, dan pengembangan wisata air yang terus berjalan hingga saat ini. Keberhasilan Desa Bligo dalam melaksanakan pemberdayaan tidak terlepas dari dukungan berbagai aktor diantaranya pemerintah desa, NGO rumah zakat, kelompok masyarakat, serta berbagai pihak swasta yang turut serta mensukseskan program desa berdaya. Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dipilih secara purposive dengan melibatkan berbagai stakeholders yang memahami permasalahan yang diteliti. pengumpulan data dilakukan melalui FGD, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan secara interaktif yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan 10 dimensi collaborative governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program desa berdaya melalui berbagai diskusi dengan berbagai pihak yang saling percaya satu sama lain. Kepercayaan diantara pihak tersebut dituangkan ke dalam komitmen berupa kontrak kerjasama dan surat rekomendasi yang disepakati secara bersama. Adapun struktur jaringan di Desa Bligo terkategori sebagai self governance, yakni setiap pihak berpartisipasi dalam menjalankan tupoksinya masing-masing. Setiap pihak memiliki kewenangan masing-masing untuk menjalankan tugasnya dan mengakses (hak) berbagai kebutuhan dalam rangka mensukseskan program desa berdaya.

Kata Kunci : *Collaborative governance; Desa Bligo; Desa Berdaya.*

1. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah memunculkan berbagai kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat mengalami penurunan pendapatan, bahkan kehilangan mata pencaharian. Data BPS Agustus 2020 menunjukkan, tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,07 %. Jumlah ini lebih tinggi dari periode sebelumnya yaitu 5,23 % pada Agustus 2019. Angka kemiskinan juga mengalami peningkatan mencapai 10,19 % pada Agustus 2020 setelah sebelumnya hanya 9,22 % pada Agustus 2019. Meskipun telah banyak dilakukan upaya menekan dampak Pandemi Covid-19, angka kemiskinan pada kuartal pertama tahun 2021 masih mencapai 10,14 %. Kajian SMERU (2020), memproyeksikan tingkat kemiskinan akan meningkat menjadi 12,4%, atau 8,5 juta orang akan menjadi miskin, sehingga kemajuan yang telah dicapai dalam mengurangi kemiskinan selama 10 tahun terakhir akan sia-sia.

Salah satu solusi mengatasi dampak pandemi dapat dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat. Keunggulan dari model pemberdayaan terletak pada karakteristik pembangunan diinisiasi dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang mandiri dan terbebas dari ketergantungan dengan memanfaatkan segenap potensi yang dimilikinya (Mardikanto & Soebianto, 2012).

Hikmat (2013) menyebutkan pemberdayaan merupakan antitesis dari paradigma pembangunan yang menredepkan pertumbuhan dan kesejahteraan. Sebagai sebuah antitesis dari paradigma yang selama ini digunakan, pemberdayaan tidak menempatkan masyarakat sebagai objek, melainkan sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Masyarakat dijadikan sebagai pelaku utama dari pembangunan yang menjadi fokus dari pembangunan itu sendiri. Muslim (2012) berkata bahwa setiap individu harus memiliki modal seperti kecukupan wawasan, perilaku, pengalaman, serta keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan mendapatkan kesejahteraan melalui dukungan dari eksternal (pihak luar) maupun dari internal (dalam kelompoknya sendiri).

Terdapat banyak program pemberdayaan yang diinisiasi oleh pemerintah maupun privat (swasta). Salah satu program yang ada ditengah masyarakat yaitu program desa berdaya yang diinisiasi oleh non-government organization Rumah Zakat. Desa Bligo, Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah yang telah berhasil menerapkan pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Berdaya. Program ini dimotori oleh Rumah Zakat, didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation, dan Pemerintah Desa Bligo. Para stakeholder ini menginisiasi kegiatan ekonomi lokal seperti pengembangbiakan pohon durian unggul, sekolah ibu-ibu produktif, pengelolaan bank sampah, kebun gizi, dan pengembangan wisata air. Berdasarkan penelitian sebelumnya, program ini telah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dari bidang penjualan makanan dan bank sampah (Orbawati, Fadlurrahman, Sujatmiko, & Mukti, 2021).

Keberhasilan Desa Bligo tersebut tidak lepas dari sinergitas stakeholder yang telah memfasilitasi dan mendukung program tersebut. Pola kerja ini sejalan dengan teori *collaborative governance* terkait dengan proses pencapaian tujuan bersama dengan melibatkan aneka *stakeholders* dimana mereka mengusung kepentingan masing-masing pihak (Hartman, Hofman, Stafford & Bruijin., 2002), sehingga mampu mewujudkan percepatan pembangunan. Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk melihat *collaborative governance* dalam program desa berdaya di Desa Bligo agar pada waktu mendatang dapat direplikasikan pada daerah-daerah lain yang juga terdampak Pandemi Covid 19. Maka dari itu, pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian ini yakni “Bagaimana *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat melalui program desa berdaya di Desa Bligo sebagai strategi mengatasi dampak pandemi Covid-19?”. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi *collaborative governance* di Desa Bligo.

Konsep Pemberdayaan

Najiyati, Asmana, & Suryadiputra (2005) menyebutkan “Pemberdayaan merupakan sebuah pendekatan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, ketidak-berdayaan, dan kerentanan masyarakat lemah”. Pemberdayaan berkaitan dengan pembagian kekuasaan/otonomi/wewenang kepada individu ataupun kelompok yang kurang beruntung agar terjadi keseimbangan dalam rangka meningkatkan kekuatan dan memandirikan individu atau kelompok sasaran (Fatimah, 2020).

Pemberdayaan masyarakat memiliki dua kecenderungan (Priyono & Pranarka, 1996): “Pertama, kecenderungan primer, yaitu menekankan pada pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan, kemampuan, dan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar lebih berdaya. Kedua, kecenderungan sekunder, yaitu menekankan pada upaya stimulasi, mendorong atau memotivasi individu dan kelompok agar memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan keberdayaan dan menentukan pilihan hidupnya dengan melalui proses dialog” (Najiyati, dkk, 2005).

Pemberdayaan memiliki beberapa prinsip agar lebih efektif, (Najiyati, dkk, 2005; Ulumiyah, Gani, & Mindarti, 2013), diantaranya:

- a. Prinsip kesetaraan, makna kesetaraan disini yaitu kesejajaran kedudukan baik antara masyarakat dengan lembaga pelaku program pemberdayaan maupun antara laki-laki dan perempuan. Keutamaan dalam prinsip ini yaitu tidak ada dominasi kedudukan diantara pihak-pihak tersebut, sehingga hubungan yang terjalin yaitu hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme sharing pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Setiap pihak mengakui kelebihan dan kekurangannya sehingga terjadi proses transfer pengetahuan dan belajar.

- b. Prinsip partisipatif, merupakan prinsip yang harus selalu diimplementasikan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Najiyati, dkk (2005) menekankan pemberdayaan harus bersifat partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi agar guna menstimulasi kemandirian masyarakat. Masyarakat harus dimotivasi untuk bergerak mulai dari proses awal hingga akhir. Pemerintah ataupun lembaga penyelenggara program pemberdayaan tidak perlu memaksimalkan intervensi selama proses pemberdayaan, karena pada dasarnya masyarakat itu sendiri merupakan pelaku pemberdayaan yang memahami apa permasalahannya dan isu yang berkembang di lingkungannya. Sehingga selama proses pemberdayaan masyarakat akan belajar memahami isu yang ada dan menyelesaikan isu yang ada melalui program-program pemberdayaan.
- c. Prinsip keswadayaan, yaitu menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat. Prinsip ini tidak menjadikan masyarakat sebagai objek pemberdayaan, namun sebagai subjek (pelaku pemberdayaan) yang memiliki kemampuan serba sedikit (Verhagen, 1996 dalam Najiyati, dkk, 2005). Kemampuan masyarakat merupakan modal utama dalam proses pemberdayaan, sedangkan bantuan dari pihak luar misalnya berupa materi atau fasilitas lain dijadikan sebagai penunjang, sehingga tidak melemahkan keswadayaan masyarakat.
- d. Prinsip berkelanjutan, program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.
- e. Prinsip keterpaduan, menekankan sinergitas/kepaduan antara kebijakan dan strategi di tingkat lokal, regional, dan nasional. Seringkali program pemberdayaan terhalang karena adanya ketidak-sinergisan antar peraturan, kebijakan, dan strategi implementasi pemberdayaan sehingga efektifitas dari suatu program pemberdayaan tidak tercapai.

Kemudian dari perspektif pelaku pemberdayaan, pemberdayaan dipandang sebagai proses kolaboratif sehingga masyarakat sebagai pelaku pemberdayaan harus berpartisipasi aktif sebagai partner. Beberapa prinsip yang dikemukakan diantaranya: menempatkan masyarakat sebagai subjek/aktor/pelaku pemberdayaan, menempatkan masyarakat sebagai agen perubahan, menggali potensi dan pengalaman diri dan dijadikan sebagai modal pemberdayaan, menghargai keberagaman, memanfaatkan jaringan-jaringan sosial, partisipasi aktif masyarakat selama proses pemberdayaan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan diri, pemberian akses dalam memanfaatkan segala sumber daya, menguatkan proses yang dinamis, sinergis dan evolutif, dan pemberdayaan dicapai melalui strukturstruktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel (Suharto, 2005).

Collaborative Governance

Collaborative governance atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biaya dan adanya politisasi terhadap regulasi (Ansell & Gash, 2007). Sejalan dengan hal tersebut, Fadlurrahman, Mukti, Kurniasih, & Winanta (2022) menyatakan bahwa pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat itu sendiri khususnya yang memiliki kesamaan kepentingan pada isu yang sedang berlangsung. Bahkan melibatkan masyarakat pada program yang sedang diimplementasikan pemerintah merupakan poin utama dalam *collaborative governance practice* (Kariem & Afrijal, 2021)

Konsep *collaborative governance* hadir karena adanya hubungan yang saling ketergantungan antar pihak. *Collaborative governance* memiliki proses panjang untuk menciptakan hasil yang memuaskan. Ansell dan Gash (2007) menyatakan lima aspek dalam *proses collaborative governance*, yaitu *face to face dialogue, trust building, commitment to process, share understanding*, hingga *intermediate outcomes*. Proses tersebut merupakan tahapan yang dilalui oleh para *stakeholders* yang berkomitmen secara formal untuk melakukan kolaborasi. Kemudian Moore (2009) memberikan delapan variabel untuk menilai *collaborative governance*, diantaranya struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan, kepercayaan, tata kelola, akses terhadap keotoritasan, distribusi akuntabilitas/tanggung jawab, berbagi informasi, dan akses terhadap sumber daya. Baik menurut Ansell dan Gash (2007) maupun Moore (2009) memiliki kemiripan dan dapat dijadikan sebagai dimensi dalam menganalisis *collaborative governance*, sehingga akan kami sintesis sebagai dimensi yang kami gunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Dimensi Collaborasi Governance

Dimensi	Makna
Face to face dialogue	Dialog secara tatap muka untuk membuat kesepakatan bersama
<i>Trust building/</i> kepercayaan	Upaya membangun kepercayaan antar <i>stakeholders</i> yang dilakukan pada tahap awal.
<i>commitment to process/</i> komitmen pada tujuan	Suatu bentuk tindakan dan sikap untuk melakukan sesuatu secara bersama. Komitmen juga menunjukkan bentuk tanggung jawab masing-masing <i>stakeholders</i> .
<i>share understanding</i>	Berbagi pemahaman mengenai apa yang dicapai melalui <i>collaborative governance</i> . Dapat berupa misi bersama, tujuan bersama, objektifitas umum,

	ideologi bersama, dan lain-lain.
<i>intermediate outcomes</i>	Output yang nyata melalui <i>collaborative governance</i> yang memberikan keuntungan bersama bagi setiap stakeholders.
Struktur jaringan	Berupa struktur kolaborasi yang tidak boleh mencerminkan adanya hierarki. Semua stakeholders memiliki posisi yang sama: hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas, dan sebagainya.
Tata kelola	Dimensi ini akan menganalisis kejelasan <i>collaborative governance</i> dari sisi hubungan antar aktor, aturan yg disepakati, serta proses kolaborasi seperti apa.
Akses terhadap keotoritasan	Berkaitan dengan ketersediaan ukuran atau ketentuan prosedur yang jelas dan diterima secara luas.
Akses terhadap sumberdaya/ <i>sharing information</i>	Berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang dapat diakses oleh setiap stakeholders.
Distribusi akuntabilitas/tanggung jawab	Berkaitan dengan pembagian tanggung jawab dalam segala proses <i>collaborative governance</i> .

Sumber: Ansell dan Gash (2007) maupun Moore (2009)

Kajian *collaborative governance* telah banyak dilakukan oleh beberapa akademisi dan menjadi rujukan dalam penelitian ini. Beberapa berfokus pada proses pemerintahan (Irawan, 2017), pembangunan pedesaan (Febrian, 2016), penguatan lembaga (Kurniasih, Styoko, dan Imron, 2017), peningkatan keterampilan wirausaha (Fitriani, Marsuq, dan Suhardiman, 2019), serta pembangunan dan pengembangan pariwisata (Yasintha, 2020; Fadlurrahman, dkk., 2022). Namun demikian, fokus penelitian-penelitian tersebut berada pada ranah yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada analisis *collaborative governance* pada program pemberdayaan dengan mensintesis dimensi *collaborative governance* itu sendiri. Artinya *state of the art* penelitian ini terletak pada penggunaan konsep/teori yang disintesis.

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental tunggal yang berfokus pada isu tertentu, yakni pemberdayaan masyarakat dan analisis *collaborative governance*. Lokasi penelitian di Desa Bligo, kecamatan ngluwar, kabupaten magelang,

jawa tengah. Informan penelitian dipilih secara purposive diantaranya Kepala Desa Bligo, Sekretaris Desa Bligo, relawan program Desa Berdaya, Rumah Zakat (NGO), dan masyarakat Desa Bligo. Pengumpulan data dilakukan dengan FGD, observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan model triangulasi sumber, sedangkan analisa data dilakukan secara interaktif mengikuti model dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014).

2. Pembahasan

Face to face dialogue

Semua tata kelola kolaboratif didasarkan pada dialog para aktor. Sebagai proses yang berorientasi pada konsesus, dengan ini dapat memberikan kesempatan kepada setiap aktor untuk mengidentifikasi peluang menguntungkan. Dialog yang dimaksud juga digunakan untuk mengurangi ketidakpercayaan antar aktor ketika menjalin kerjasama dan mencegah pencarian keuntungan bersama pada tahap awal kerjasama, hal ini karena pada tahap awal penekanannya adalah pada membangun konsensus dari pada mengelola kepentingan masing-masing aktor. Dalam pengimplementasian Program Desa Berdaya di Desa Bligo ini, para anggota masyarakat, pengurus, dan stakeholder yang terlibat melakukan dialog dan interaksi secara tatap muka untuk membuat keputusan-keputusan/kesepakatan bersama demi berkembangnya desa berdaya. Dimana dialog secara tatap muka tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat bersama.

Pelaksanaan interaksi secara tatap muka melalui musyawarah mufakat ini ditujukan agar terjalin proses pembangunan kepercayaan, saling menghormati, saling pengertian yang timbul didiri setiap aktor yang terlibat. Selain itu, dalam pelaksanaan rencana kerja program Desa Berdaya secara rutin melaksanakan pertemuan dengan stakeholder. Pertemuan ini dilaksanakan untuk membahas persiapan dan segala instrument yang diperlukan dalam pengelolaan Desa Berdaya. Dalam pertemuan tersebut bersifat privat dan tertutup dengan pembahasan mengenai apa saja program yang bisa dijalankan dan besaran kontribusi yang bisa diberikan dan dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Trust Building

Pembangunan kepercayaan antar pemangku kepentingan merupakan titik awal dari setiap proses kolaborasi. Beberapa referensi menyebutkan bahwa proses kolaborasi tidak hanya berfokus pada interaksi pribadi, namun juga membangun kepercayaan antar aktor. Trust building atau membangun kepercayaan merupakan fase yang digunakan untuk membentuk proses saling pengertian antara pihak-pihak yang terlibat dan berkomitmen dalam proses kolaborasi. Kepercayaan seluruh aktor termasuk masyarakat, pengurus, dan pihak lain dalam berkolaborasi mengelola program desa berdaya dikarenakan adanya interaksi profesionalitas sosial, sehingga timbul rasa saling percaya untuk mengupayakan berbagai kegiatan bersama stakeholder

lainnya yang masih dalam satu jaringan untuk mencapai *goal* yang telah ditetapkan secara bersama.

Aspek kepercayaan ini telah diupayakan dibangun dengan beberapa cara, diantaranya memprioritaskan waktu berkualitas, bertanggung jawab, berkomunikasi, berusaha untuk dapat dipercaya, adanya keterbukaan antar anggota, melakukan pendekatan dan sosialisasi, bekerja dengan baik, sportif dan didukung administrasi secara rutin, saling menghormati pendapat satu sama lain, saling berkomunikasi dan sering mengadakan pertemuan, rasa saling terkait dan mengkomunikasikan, keterbukaan dalam semua hal, saling percaya terbuka, dan selalu terdepan memberi contoh dalam melaksanakan program, membuat program yang nyata dan dikerjakan dengan sportif, serta selalu menjaga moral.

Dasar terciptanya rasa saling percaya dan rasa saling percaya itu penting dilakukan dikarenakan sudah kenal dengan sifat personalnya, keinginan untuk maju bersama, semua bekerja sesuai dengan rencana saling percaya dengan sesama itu penting agar dalam berorganisasi bisa nyaman, terbuka tentang semua hal kegiatan dan pembukuan, tidak saling menyalahkan agar tetap bersatu, terbuka tentang semua hal kegiatan dan pembukuan, pengurus selalu terbuka dan tidak menyalahkan salah satu atau lainnya, selalu jujur dan ikhlas sesama pengurus dan anggota, jujur dan disiplin untuk tercapainya program yang nyata, rasa kebersamaan untuk mencapai tujuan besar bersama. Rasa percaya ini penting sekali harus terjaga agar membuat kelancaran semua kegiatan dan semua hal. Selain itu, terbukti bahwa dengan adanya rasa saling percaya di antara warga sangat mempengaruhi perkembangan program dan kegiatan desa berdaya di Desa Bligo.

Commitment to process

Komitmen atau keterlibatan terhadap proses cenderung sangat bervariasi, hal ini dikarenakan melalui keterlibatan akan mampu menunjukkan proses kolaborasi yang merupakan variabel utama untuk menggambarkan keberhasilan atau kegagalan program. Komitmen (keterlibatan) berjalan seiring dengan insentif yang kuat untuk terlibat dalam tata kelola bersama. Komitmen terhadap proses berarti menumbuhkan keyakinan bahwa negosiasi yang jujur dan timbal balik merupakan *the best way* dalam rangka merealisasikan tujuan program yang diinginkan, hal ini menunjukkan bahwasanya rasa saling percaya merupakan kunci dari kolaborasi.

Perwujudan komitmen program Desa Berdaya di Desa Bligo yakni mengenai suatu bentuk tindakan dan sikap untuk melakukan sesuatu secara bersama. Komitmen setiap aktor merujuk kepada kontrak kerjasama serta surat rekomendasi yang telah disepakati, hal tersebut ditunjukkan juga menggambarkan bentuk tanggung jawab masing-masing stakeholders. Komitmen yang dibangun dalam pelaksanaan program tersebut ditujukan untuk menunjukkan betapa bersih, adil, dan transparannya proses kolaborasi. Komitmen yang dibangun oleh aktor dan pemangku kepentingan yang aktif bergantung pada kepercayaan aktor lain untuk menghormati perspektif dan kepentingan mereka.

Kepemilikan dan komitmen dapat memperkuat keterlibatan diantara para pemangku kepentingan. Rasa memiliki proses kolaborasi akan mempengaruhi munculnya rasa saling memiliki terhadap proses. Kepercayaan berkontribusi pada fakta bahwa seluruh aktor yang terlibat di Program Desa Berdaya di Desa Bligo sangat bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi tugas masing-masing aktor yang terlibat.

Share understanding

Berbagi pemahaman mengenai apa yang ingin dicapai melalui collaborative governance berupa misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, ideologi bersama, dan lain-lain. Dalam hal ini, berbagai pemahaman ini terimplementasi dari adanya tujuan utama atau rencana-rencana besar dari program desa berdaya. Tujuan bersama itu diantaranya, menuju masyarakat yang berdaya dan berhasil, mendapatkan masukan/tambahan dana untuk pengelolaan kegiatan, memajukan masyarakat di wilayah Desa Bligo untuk lebih maju lagi, merubah menjadi baik lagi, meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga, menuju masyarakat yang berdaya dan berhasil, Desa Wisata, menyejahterakan masyarakat, menjadi warga yang makmur atau tidak ada kurang masalah ekonomi, menuju desa mandiri, meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, pengembangan ekonomi terkait legaisasi produk, sertifikasi halal, pengembangan/pelatihan produk jajanan pasar, riset pakan ternak dari limbah kulit singkong atau jagung, dan lainnya.

Selain itu, terdapat juga rencana-rencana besar yang ingin diraih secara bersama, baik masyarakat, pengurus, dan stakeholder. Diantaranya, masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat mencapai kesejahteraannya, menjadikan masyarakat yang sukses dan mandiri, masyarakat yang adil, makmur, dan berpendidikan, menambah pendapatan desa, meningkatkan perekonomian warga desa bligo, menjadikan Desa Bligo menjadi Desa Wisata, Riset pengelola sangat dinamis, teguhnya desa wisata, masyarakat yang sejahtera, dan lainnya.

Dari berbagai tujuan bersama tersebut, belum semua tujuan sudah tercapai. Masih ada beberapa tujuan yang belum tercapai diantaranya, tujuan menuju masyarakat yang berdaya dan berhasil guna tujuan belum sepenuhnya tercapai karena masih ada sebagian masyarakat yang belum berdaya, tujuan menjadi desa wisata, tujuan meningkatkan taraf hidup/ekonomi masyarakat belum tercapai karena masih butuh peningkatan lagi.

Masyarakat dan pihak lain (stakeholder) dari program desa berdaya mengharapkan agar masyarakat bisa berdaya mandiri dan mampu berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, memberi bantuan materil maupun non-materil, menambah penghasilan, menjadikan wilayah desa lebih bersih, memberdayakan masyarakat, meningkatkan daya hidup mandiri masyarakat, masyarakat bisa berdaya mandiri dan mampu berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, menambah pendapatan desa, mendorong dan mematuhi, desa dan warga saling mendukung apa yang warga harapkan,

mensupport segala kegiatan, memberikan bantuan perangkat penunjang, membantu administrasi dan pelaporan, membuat programnya berkembang dan existensi bertahan lama, masyarakat bisa mandiri dan mampu berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, meningkatkan kesejahteraan, kebersihan lingkungan, desa maju dan dinamis.

Dari berbagai tujuan atau rencana-rencana besar dari program desa berdaya ini, pentingnya perlu adanya sikap saling mengingatkan dan menguatkan antara anggota masyarakat, pengurus, dan stakeholder. Cara itu dilakukan dengan saling gotong royong dan kerjasama dengan baik, saling berkomunikasi, mengadakan pertemuan/pelatihan, sering berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan pertemuan rutin yang diagendakan dan laporkan, aktif bergerak mengurus, pemdes selalu memberikan informasi untuk warga, sering dilakukan koordinasi, bertemu dan berunding satu sama lain antara setiap anggota, saling bahu membahu dan kerja sama yang harmonis, saling berkomitmen, dan lainnya.

Intermediate outcomes

Bentuk nyata dari adanya kolaborasi yakni terdapat kemungkinan mencapai kesuksesan dalam berkolaborasi. Pada program desa berdaya ini, terdapat beberapa program dan kegiatan yang ada dan sudah terlaksana. Program dan kegiatan tersebut diantaranya, Bank sampah, PKK desa, Kelompok Wanita Tani (KWT), PAMSIMAS, Kegiatan wisata air dan kuliner, panahan, ternak kambing, Angkringan Aku Orange, LPBD, Kelompok ternak, Kelompok tani, PLTHH, RPP, TPQ, Desa wisata, BUMDES, PLTMTL, Gapoktan, Mikro hidro.

Struktur jaringan

Struktur jaringan dapat dideskripsikan sebagai suatu keterkaitan antar setiap aktor/elemen yang bersatu secara bersama dimana hal tersebut menggambarkan berbagai unsur fisik dari suatu jaringan yang dikelola. Keunikan dari pengelolaan program desa berdaya di desa bligo yakni berupa self governance, yaitu tata kelola yang tidak memiliki satuan administratif yang formal, namun setiap pihak saling bahu membahu (berpartisipasi aktif) dalam menjalankan tupoksinya di dalam jaringan tersebut. Hasil Focus Grup Discussion (FGD), observasi, dan wawancara (in-dept interview) menunjukkan bahwa unit-unit yang terlibat dalam pelaksanaan collaborative governance meliputi pemerintah desa, pengurus, anggota, masyarakat, dan stakeholder lainnya.

Pihak-pihak eksternal (stakeholders) yang ikut terlibat dalam program desa berdaya ini yaitu Pemerintah Desa Bligo, Tim Penggerak PKK, Rumah Zakat, BPPT Kecamatan Ngluwar, Universitas Negeri Yogyakarta, Pemerintah Kecamatan, Dinas Pertanian, dan lainnya. Dimana peran pihak eksternal (stakeholders) tersebut yaitu memberikan bimbingan/pelatihan dan pemberian bantuan keuangan, memberikan bimbingan/support kinerja untuk lebih baik, dan lainnya.

Terkait dengan jumlah pengurus dan anggota masyarakat saat ini yang terlibat dalam program desa

berdaya diketahui berjumlah lebih dari 100 orang yang tersebut diberbagai program seperti bank sampah, kelompok wanita tani, ternak kambing, dan lain sebagainya. Dimana para pengurus dan anggota tersebut dalam program desa berdaya berperan untuk bekerjasama dan memberikan pelayanan, memaksimalkan kegiatan akibat adanya wabah kasus Covid-19, menjalankan perannya dengan baik dan berusaha untuk bisa memajukannya, berjalan aktif antara pengurus bersama anggota, saling bekerja sama dan kompak, memberikan pelayanan dan anggota menjalankan program masing masing organisasi, membuat makanan ringan dari yang disediakan oleh anggota, meningkatkan peran pengurus dengan sangat baik dengan selalu memberi contoh dan selalu tampil ke depan dalam melaksanakan program-programnya, saling mendukung dalam kegiatan, menjalankan peran sejalan dengan porsinya masing-masing. Dalam hal ini juga, para anggota masyarakat, pengurus, dan stakeholder memiliki hak (wewenang) dalam menjalankan perannya dalam mewujudkan tujuan bersama.

Tata kelola

Hubungan kepercayaan antar aktor sangat perlu untuk dibangun, hal ini dikarenakan dengan landasan adanya aturan yang disepakati bersama dari setiap pemangku kepentingan, serta ada kebebasan yang menentukan bagaimana kolaborasi dijalankan. Pengimplementasian tata kelola dalam Program Desa Berdaya di Desa Bligo diterapkan melalui pengungkapan kejelasan antara siapa yang menjadi pengurus dan siapa yang menjadi anggota. Dukungan untuk interaksi dan komunikasi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh tiap-tiap pihak dalam mengusahakan tujuan bersama desa berdaya. Dalam hal ini interaksi dan komunikasi dengan stakeholder adalah dilakukan dengan secara formal dan informal. Secara formal biasanya dengan diadakannya pelatihan atau pertemuan-pertemuan, tetapi pertemuan-pertemuan juga kadang dilakukan secara informal.

Akses terhadap keotoritasan

Dalam pelaksanaan program Desa Berdaya di Desa Bligo dapat diketahui bahwa seluruh stakeholders diberikan kewenangan untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan bersama. Masing-masing stakeholder memiliki tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peran masing-masing, Universitas Tidar sebagai pihak eksternal bertindak dan berwenang untuk memberikan pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan kemampuan teknis. Pemerintah desa sebagai regulator berwenang mengatur pemanfaatan seluruh program dengan cara membagi dan menentukan tugas dan peran seluruh stakeholders. Sementara masyarakat berwenang untuk memberikan dukungan dalam bentuk pikiran, waktu, dan biaya. Masyarakat juga dapat melakukan koreksi apabila terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan program Desa Berdaya di Desa Bligo.

Akses terhadap sumber daya / berbagi informasi

Dalam hal pengelolaan akses terhadap informasi-informasi yang ada, terdapat sharing informasi yang dilakukan antar anggota masyarakat, pengurus, dan stakeholder guna mewujudkan tujuan bersama yang direncanakan. Dimana sharing informasi tersebut dilakukan dengan cara saling mengutarakan kelebihan dan kekurangan, mengadakan pertemuan rutin, mengadakan pertemuan lewat media informasi, melalui grup Whatsapp, dan menyampaikan pendapat secara langsung.

Selain aspek berbagi informasi dalam pengelolaan desa berdaya, terdapat aspek terhadap sumber daya. Dimana dalam hal ini, terdapat beberapa sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki oleh kepengurusan desa berdaya, diantaranya saluran air, alat/fasilitas pendukung, bank sampah, gudang, gerobak, ambulan desa, meja kursi, SDM yang banyak, sekretariat, buku catatan, program ekonomi, dsb. Dalam pengelolaan sumber daya dan sarana prasarana yang ada, seluruh pengurus dan pihak eksternal diperbolehkan untuk menggunakan sumber daya dan sarana prasarana tersebut untuk digunakan demi mewujudkan kepentingan bersama.

Distribusi akuntabilitas / tanggung jawab

Pada pelaksanaan desa berdaya dalam segala proses collaborative governance terdapat adanya pembagian tugas/peran untuk mewujudkan tujuan bersama yang telah direncanakan. Dimana pembagian tugas/peran ini penting adanya dilakukan agar masing-masing pihak yang berperan dapat menjalankan tugasnya sesuai apa yang telah diberikan tanpa adanya tabrakan peran dengan pihak lain.

Pembagian tugas/peran tersebut dilaksanakan dengan membagi tugas sesuai dengan peran orang tersebut, bergantian di jadwal, bekerjasama dalam menjalankan tugas, membagi tugas diatur menurut jabatan dan kewenangan dan kesepakatan bersama, menyesuaikan struktur dan tupoksi masing-masing, dibuat stuktur organisasi dengan tugas masing-masing, menyesuaikan pada kemampuan masing-masing, dan lainnya.

3. Kesimpulan

Program Desa Berdaya di Desa Bligo dimulai dengan para aktor yakni anggota masyarakat, pengurus, dan stakeholder yang terlibat melakukan pertemuan untuk berdialog dan berinteraksi secara tatap muka seperti untuk membuat keputusan-keputusan/kesepakatan bersama demi berkembangnya desa berdaya. Kepercayaan seluruh aktor dalam berkolaborasi didasarkan pada hubungan profesionalitas dan/atau sosial, selain itu komitmen masing-masing aktor mengacu pada kontrak kerjasama dan surat rekomendasi yang telah disepakati bersama, hal tersebut ditunjukkan juga menggambarkan bentuk tanggung jawab masing-masing stakeholders. Pelaksanaan program Desa Berdaya di Desa Bligo terimplementasi dari adanya tujuan/rencana, meskipun dalam pelaksanaannya belum semua tujuan/rencana tercapai. Pada program desa berdaya ini, terdapat beberapa program dan kegiatan yang ada dan sudah

terlaksana. Program dan kegiatan tersebut diantaranya, Bank sampah, PKK desa, Kelompok Wanita Tani (KWT), PAMSIMAS, Kegiatan wisata air dan kuliner, panahan, ternak kambing, Angkringan Aku Orange, LPBD, Kelompok ternak, Kelompok tani, PLTHH, RPP, TPQ, Desa wisata, BUMDES, PLTMTL, Gapoktan, Mikro hidro.

Keberadaan struktur jaringan pada pengelolaan Desa Bligo dapat dikategorikan dalam bentuk self governance, sebagai sebuah struktur yang tidak memiliki satuan administratif, akan tetapi masing-masing pihak berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di struktur jaringan (network). Pengimplementasian tata kelola diterapkan melalui pengungkapan kejelasan antara pengurus dan anggota. Dalam pelaksanaan program Desa Berdaya di Desa Bligo dapat diketahui bahwa seluruh stakeholders diberikan kewenangan untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan bersama. Dalam hal pengelolaan akses terhadap informasi-informasi yang ada, terdapat sharing informasi yang dilakukan antar anggota masyarakat, pengurus, dan stakeholders juga terdapat beberapa sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki oleh kepengurusan desa berdaya. Pada pelaksanaan desa berdaya dalam segala proses collaborative governance terdapat adanya pembagian tugas/peran untuk mewujudkan tujuan bersama yang telah direncanakan.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., dan Gash, A. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol. 18(4): 543-571.
- Creswell, J. W. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Edisi Indonesia (cetakan I). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadlurrahman, Mukti, A., Kurniasih, Y., & Winanta, R. A. 2022. Collaborative Governance Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*. Vol. 7(2): 29-35.
- Fatimah, Siti. 2020. *Peran Rumah Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Berdaya (Studi Kasus di Desa Sukadalem, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang)*. Skripsi. UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- Febrian R. A. 2016. Collaborative Governance Dalam Pembangunankawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep Dan Regulasi). *WEDANA: Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*. Vol. 2(1): 200-208.
- Fitriani, Marsuq, & Suhardiman. 2019. Collaborative Governance Dalam Meningkatkan Keterampilan Kewirausahaan Masyarakat di Desa Muara Pantun Kabupaten Kutai Timur. *Administrasi Publik*. Vol. 1(1): 584-602.
- Friedman, John. 1992. *Empowerment the Politics of Alternative Development*. Cambridge, USA: Blackwell Publishers

- Hartman, C., Hofman, P. S., Stafford, E. R., & Bruijin. 2002. *Environmental collaboration: potential and limits*. In T. de Bruijn & A. Tukker (Eds.), *Partnership and Leadership: Building Alliances for a Sustainable Future* (pp. 21-40). Dordrecht: Boston: Kluwer Academic Publishers. And, Cordery, J.
- Hikmat, H. 2013. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press
- Ife, J. W. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Longman.
- Irawan D. 2017. Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Kota Surabaya). *Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol. 5(3): 1-12.
- Kariem, M. Q., & Afrijal. 2021. Collaborative Governance pada Revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 6(3): 107-114.
- Kurniasih, D., Setyoko, P. I., & Imron M. 2017. Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. *Sosiohumaniora*. Vol. 19(1): 1-7.
- Mardikanto, T & Soebianto, P. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moore, M. H. 2009. *Networked government*. In *Unlocking the power of networks: keys to high performance government*. Retrieved from <http://hollis.harvard.edu/?itemid=%7Clibrary/m/aleph%7C011904506>
- Muslim, A. 2012. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru
- Najiyati, S., Asmana, A., dan Suryadiputra, I. N. N. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia*. Bogor: Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada.
- Orbawati E. B., Fadlurrahman, Mukti, A. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Desa Berdaya di Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang (Laporan Penelitian)*. Magelang: Universitas Tidar. 2021.
- Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Sudarmo. 2011. *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Surakarta: Smart Media.
- Sugiyono. 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. ALFABETA: Bandung
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Ulumiyah, I., Gani, A. J. A., dan Mindarti, L. I. 2013. Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1(5): 890-899.
- Yasintha, P. N. 2020. Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 4(1): 1-23.